

# ANALISIS INDEKS WILLIAMSON PROVINSI JAWA TENGAH 2017-2021

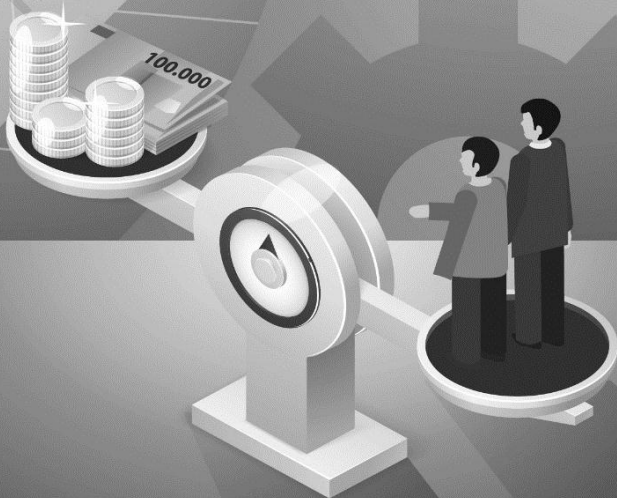


# ANALISIS

INDEKS WILLIAMSON

PROVINSI JAWA TENGAH

2017-2021



# **ANALISIS INDEKS WILLIAMSON**

## **PROVINSI JAWA TENGAH 2017-2021**

No. ISBN :  
No. Publikasi : 33000.2247  
Katalog : 9201024.33  
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm  
Jumlah Halaman : viii + 53 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dicetak oleh :

CV. Surya Lestari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

# ANALISIS INDEKS WILLIAMSON

## PROVINSI JAWA TENGAH 2017-2021

### Anggota Tim Penyusun :

Pengarah : Ir. Adhi Wiriana, M.Si

Penanggung Jawab : Didik Nursetyohadi, M.Agb.

Penyunting : Didik Nursetyohadi, M.Agb.  
Mathius Samuharwadi, S.ST

Penulis : Diana Dwi Susanti, S.ST

Pengolah Data : Diana Dwi Susanti, SST

Desain dan Layout : Joko Mulyono

Penyusun : Diana Dwi Susanti, S.ST

# KATA PENGANTAR

Indeks Williamson merupakan satu instrumen dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Indeks Williamson secara garis besar mengukur seberapa kesenjangan yang ada pada suatu pembangunan pada suatu wilayah.

Penyusunan publikasi Analisis Indeks Williamson 2017-2021 bertujuan untuk menyediakan informasi dalam rangka mengevaluasi kesenjangan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Tengah..

Publikasi ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang berguna untuk berbagai tujuan dan memberikan informasi berharga bagi para pengguna data BPS, baik dari kalangan pemerintah maupun publik.

Saran dan kritik perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi sejenis pada masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih.

Semarang, Juli 2021  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Jawa Tengah



**Adhi Wiriana**



<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>INFOGRAFIS</b> .....	1
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	3
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	5
1.1. Latar Belakang .....	5
1.2. Tujuan dan Manfaat .....	8
1.3. Ruang Lingkup .....	9
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II. KONSEP DAN METODE PERHITUNGAN</b> .....	11
2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi .....	11
2.2. Gini Rasio .....	12
2.3. Kriteria Bank Dunia .....	13
2.4. Ukuran Ketimpangan Antarwilayah .....	14
<b>BAB III. POTENSI SOSIAL EKONOMI JAWA TENGAH</b> .....	17
3.1. Geografis Dan Demografi Jawa Tengah .....	17
3.2. Posisi Ekonomi Jawa Tengah Indonesia .....	20
<b>BAB IV. ANALISIS KETIMPANGAN JAWA TENGAH</b> .....	27
4.1. Ketimpangan Pendapatan .....	27
4.2. Ketimpangan Wilayah .....	33
4.3. Analisis Indeks Williamson .....	37
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	43
5.1. Kesimpulan .....	43
5.2. Saran .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	47
<b>LAMPIRAN</b> .....	49

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah, 2010-2020 .....	38
Tabel 1. PDRB Per Kapita menurut Provinsi di Indonesia, 2017-2021 .....	51
Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi menurut Provinsi di Indonesia, 2017-2021	53
Tabel 3. Gini Rasio menurut Provinsi di Indonesia, 2017-2021 (Maret) .....	54
Tabel 4. Jumlah Penduduk Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota 2021.....	55



## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1. Kontribusi Ekonomi Lima Terbesar Provinsi di Indonesia 2018-2020.....	21
Grafik 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia 2020.....	22
Grafik 3.3. PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Indonesia 2020 .....	24
Grafik 3.4. Gini Rasio Menurut Provinsi di Indonesia 2020.....	26
Grafik 4.1. Perkembangan Gini Rasio Jawa Tengah dan Indonesia, Maret 2016 – Maret 2020 .....	29
Grafik 4.2. Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Golongan 40% Bawah di Jawa Tengah, 2017-2021 .....	30
Grafik 4.3. Ketimpangan Pendapatan Golongan 40% Bawah Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah, 2021 .....	32
Grafik 4.4. Perkembangan PDRB Per Kapita Jawa Tengah (Juta Rupiah) 2017-2021 .....	34
Grafik 4.5. PDRB Per Kapita Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah) 2021 .....	35
Grafik 4.6. Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah, 2017-2021.....	40



# INFOGRAFIS

## INDEKS WILLIAMSON PROVINSI JAWA TENGAH 2017-2021





Selama proses awal pembangunan terjadi suatu dilema antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan. Salah satu masalah kompleks yang dihadapi dalam proses pembangunan suatu wilayah adalah ketimpangan pendapatan antar wilayah. Faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi daerah antara lain konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas, faktor produksi yang rendah antar daerah, perbedaan sumber daya alam antar wilayah, perbedaan kondisi demografi antar wilayah dan kurang lancarnya perdagangan wilayah.

Hal ini menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau kesenjangan antar daerah. Tingkat perbedaan pendapatan masyarakat selain berasal dari faktor internal seperti SDM juga disebabkan faktor eksternal yaitu ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Indeks williamson di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 berkisar pada nilai 0,634. Angka indeks ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah tinggi.

Penciptaan ekonomi riil ini diprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju pesat dengan melakukan *sharing skill* dari daerah yang maju ke daerah tertinggal. Selain itu perlu membangun konektivitas ekonomi antar daerah dengan pembangunan infrastruktur dan sarana informasi yang seimbang.



# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Secara sederhana pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perubahan dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah dari tahun ke tahun. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Secara teoritis dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan suatu masyarakat, maka tingkat kesejahteraannya juga semakin baik.

Menurut Lincoln Arsyad (1999), tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Pertumbuhan PDB yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dengan kata lain, bahwa apa yang disebut dengan *“trickle down effect”* dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan. Apabila tidak ada pemerataan maka yang akan menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi ini adalah masyarakat yang mempunyai modal yang besar dan masyarakat dari golongan atas.

Selama proses awal pembangunan terjadi suatu dilema yaitu antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan, fenomena

ini menjadi masalah yang telah lama dan harus dihadapi. *Trade off* atau pertukaran antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan di masing-masing daerah selalu terjadi.

Ketimpangan dapat terjadi karena salah satu faktor seperti prioritas pembangunan lebih aktif di wilayah perkotaan sedangkan wilayah pedesaan jarang tersentuh. Dengan adanya perbedaan pembangunan dan infrastruktur juga berdampak terhadap perbedaan pendapatan masyarakat baik yang ada di kota maupun di daerah. Ini menjadi salah satu masalah kompleks yang dihadapi dalam proses pembangunan suatu wilayah yaitu ketimpangan pendapatan antar wilayah.

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi harus dapat menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja yang makin terbuka bagi penduduk dan masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan harus sikron sehingga angkatan kerja bisa terserap dengan baik. Hal ini memerlukan kebijakan pembangunan yang komprehensif, menyeluruh dan bisa memenuhi kebutuhan wilayahnya. Namun kenyataannya terkadang hasil pembangunan pada masing-masing wilayah menciptakan ketimpangan antar daerah.

Tanpa koordinasi setiap daerah akan mempunyai kebijakan untuk meningkatkan pembangunan wilayahnya. Kemampuan pembangunan wilayah ini dan sumber daya alam yang berbeda-beda antar wilayah akan menimbulkan ketimpangan. Ketimpangan pendapatan regional merupakan ketidakmerataan



pendapatan yang terjadi pada masyarakat suatu wilayah dengan wilayah lain. Ketidakmerataan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait antara lain kepemilikan sumber daya, fasilitas yang dimiliki, infrastruktur, keadaan geografis wilayah dan lain sebagainya. Walaupun pada dasarnya kesenjangan pembangunan adalah *inherent* dengan proses pembangunan itu sendiri (Ardani, 1992). Ketimpangan ekonomi sering digunakan sebagai indikator perbedaan pendapatan per kapita rata-rata, antar kelompok tingkat pendapatan, antar kelompok lapangan kerja, dan antar wilayah.

Beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis *development gap* antar wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), *Human Development Index* (HDI), konsumsi rumah tangga per kapita, kontribusi sektoral PDRB, tingkat kemiskinan dan struktur fiskal. Faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi daerah adalah konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas, faktor produksi yang rendah antar daerah, perbedaan sumber daya alam antar wilayah, perbedaan kondisi demografi antar wilayah dan kurang lancarnya perdagangan wilayah.

Adanya alokasi investasi yang tidak merata di seluruh wilayah. Karena investor lebih memilih wilayah yang memiliki fasilitas yang baik seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga sumber daya manusia. Sedangkan daerah yang tidak memiliki fasilitas yang belum baik akan semakin tertinggal, demikian akan menghasilkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar, sehingga akan berdampak terhadap tingkat pendapatan daerah.

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Jawa juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan. Jawa Tengah mempunyai

kontribusi ekonomi terbesar keempat dari ekonomi nasional sebesar 8,36%. Dalam periode 2015-2019 pembangunan Jawa Tengah terus tumbuh melampaui pertumbuhan nasional. Karakteristik ekonomi Jawa Tengah yang berpotensi menumbuhkan perekonomian nasional dengan jumlah penduduk terbesar ke-3 di Indonesia dan mempunyai keamanan yang kondusif merupakan pasar potensial yang selalu dilirik investor. Tahun 2021, ekonomi Jawa Tengah mulai bangkit dari kasus covid-19 tahun 2020. Kinerja ekonomi tumbuh sebesar 3,32%.

Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota ini tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan distribusi pendapatan. Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia.

## **1.2. TUJUAN DAN MANFAAT**

Tujuan :

- 1) Menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi
- 2) Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan

Manfaat :

- 1) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah
- 2) Memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi para pembaca yang tertarik untuk meneliti hal yang sama

### **1.3. RUANG LINGKUP**

Wilayah cakupan dalam penyusunan Indeks Williamson ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Indeks Williamson yang akan disusun meliputi Indeks Williamson migas dan tanpa migas.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Bab I Pendahuluan**

Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang adanya ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah, rumusan masalah tentang ketimpangan yang terjadi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan sistematika penulisan

#### **Bab II Metode Penghitungan**

Pada bab ini dipaparkan tentang definisi operasional, populasi jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian tentang ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

### **Bab III Profil Ekonomi Jawa Tengah**

Menggambarkan keadaan demografi kabupaten/kota di Jawa Tengah, perekonomian antar kabupaten/kota dan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Jawa Tengah.

### **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini dipaparkan tentang deskripsi ketimpangan pendapatan, analisis tentang ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan pembahasan tentang tingkat ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

### **Bab V Penutup**

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penghitungan serta memberikan beberapa saran terkait masalah pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

## BAB II. KONSEP DAN METODE PERHITUNGAN

### 2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Menurut Sukirno (2004), untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Jadi perubahan pendapatan nasional yang semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi, atau dengan kata lain pertumbuhan, baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibandingkan PDRB riil suatu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya. PDRB riil dicerminkan oleh nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.

Formula untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_t = \frac{PDRB_{riil_t} - PDRB_{riil_{t-1}}}{PDRB_{riil_{t-1}}}$$

Keterangan :

$Y_t$  = Pertumbuhan ekonomi tahun t

PDRB riil = Produk Domestik Regional Bruto riil

t = Periode tahun

## 2.2. Gini Rasio

Indeks Gini, Rasio Gini atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan oleh statistikus Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 (*International NGO Forum on Indonesia Development, 2018*). Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai ketimpangan sempurna (Todaro dan Smith, 2006).

Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks Gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara. Rumus menghitung nilai Rasio Gini atau Indeks Gini menurut BPS (2017) adalah sebagai berikut.

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (F_{Ci} + F_{Ci-1})$$

Keterangan :

GR = Koefisien Gini

F<sub>pi</sub> = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F<sub>ci</sub> = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

Fci-1 = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini (Susanti et al 2007) adalah sebagai berikut :

- a. Gini rasio  $< 0,4$  : tingkat ketimpangan rendah
- b.  $0,4 < \text{gini rasio} < 0,5$  : tingkat ketimpangan sedang
- c. Gini rasio  $> 0,5$  : tingkat ketimpangan tinggi

### 2.3. Kriteria Bank Dunia

Cara lain yang juga seringkali diterapkan dalam mengidentifikasi ketimpangan pendapatan adalah kriteria yang dikemukakan oleh Bank Dunia yang mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan, yaitu :

- a. 40% penduduk dengan pendapatan rendah
- b. 40% penduduk dengan pendapatan menengah
- c. 20% penduduk dengan pendapatan tinggi

Kategori ketimpangan yang ditentukan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia adalah sebagai berikut :

- a. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12% dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi
- b. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12%-17% dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang atau menengah.

- c. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17% dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

#### 2.4. Ukuran Ketimpangan Antar wilayah

Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat diukur dengan Indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antarwilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

Indeks Williamson merupakan hubungan antara disparitas regional dengan tingkat ekonomi dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan berkembang. Dasar perhitungan Indeks Williamson adalah pendapatan regional per kapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah. Formulasi Indeks Williamson secara statistik dapat ditampilkan dengan formula sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_i^n (y_i - \bar{y})^2 \frac{n_i}{n}}}{\bar{y}} \times 100$$

Keterangan :

IW = Indeks Williamson

$Y_i$  = PDRB Per kapita tiap Kabupaten/kota

$\bar{y}$  = PDRB Per kapita Provinsi



$n_i$  = Jumlah Penduduk tiap Kabupaten/kota

$n$  = Jumlah Penduduk Provinsi

Dengan menggunakan Indeks Williamson, maka dapat dilihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Dan besaran nilai berkisar antara 0-1. Kriteria penilaian Indeks Williamson : Jika nilai IW menjauhi 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin besar, dan jika nilai IW mendekati 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin kecil.



## **BAB III. POTENSI SOSIAL EKONOMI JAWA TENGAH**

Jawa Tengah sudah dikenal sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki posisi strategis, baik dari aspek ekonomi maupun dari sisi demografinya. Secara ekonomi provinsi ini menghubungkan dua kota besar Jakarta dan Surabaya. Penghubung dari kawasan timur dan barat Indonesia atau sebaliknya. Infrastruktur yang menunjang perekonomian Jawa Tengah sebagai *entry poin* antara lain pelabuhan Tanjung Mas, Bandara Internasional Ahmad Yani yang merupakan sarana dan prasarana lalu lintas perdagangan barang dan jasa serta lalu lintas penumpang baik dalam maupun luar negeri.

Adanya infrastruktur tersebut mampu mendorong berbagai sektor antara lain sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri makanan, minuman dan tembakau, sektor pertanian, serta jasa hiburan dan rekreasi di Jawa Tengah yang terus berkembang. Beberapa faktor ini dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dengan rata-rata diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi alam dan lingkungan mempengaruhi budaya dan karakteristik penduduk Jawa Tengah.

### **3.1. Geografis dan Demografi Jawa Tengah**

#### **3.1.1. Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah**

Jawa Tengah merupakan provinsi yang terletak di tengah pulau Jawa. Posisi ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi yang cukup strategis untuk mengembangkan berbagai aktivitas ekonomi, baik di sektor pertanian, industri, maupun perdagangan. Secara geografis, Jawa Tengah dikelilingi oleh 3 (tiga) provinsi dan 2 (dua) lautan. Di sebelah utara, Provinsi Jawa Tengah dibatasi oleh

Laut Jawa, sedangkan di sebelah timur, berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Sementara di sebelah barat, Provinsi Jawa Tengah berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan di bagian selatan, Provinsi Jawa Tengah berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Indonesia.

Provinsi Jawa Tengah terletak pada  $5^{\circ}40' - 8^{\circ}30'$  LS dan  $108^{\circ}30' - 111^{\circ}30'$  BT. Posisi astronomis ini menyebabkan Jawa Tengah memiliki curah hujan dan kelembaban yang cukup tinggi. Secara umum, rata-rata suhu udara di Jawa Tengah berkisar antara  $23,90^{\circ}\text{C} - 28,20^{\circ}\text{C}$ , dengan kelembaban berkisar antara 69-83 persen. Sementara itu, rata-rata banyaknya curah hujan berkisar antara 1.024-3.624 mm, dengan rata-rata jumlah hari hujan berkisar 56-142 hari pertahun.

Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang cocok untuk budidaya tanaman pertanian dan perkebunan. Selain karena memiliki curah hujan yang cukup, Jawa Tengah juga memiliki lahan subur yang terbentang di berbagai lereng gunung yang ada di Jawa Tengah. Sampai dengan tahun 2019, Jawa Tengah memiliki luas lahan sawah sebesar 1,05 juta hektar atau sekitar 14,06 persen dari luas total lahan sawah di Indonesia. Selain menjadi provinsi dengan luas lahan sawah terbesar kedua setelah Jawa Timur, Jawa Tengah juga menjadi wilayah pemasok tanaman hasil pertanian yang utama bagi Indonesia, terutama padi dan palawija.

Secara administratif, luas Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 32.544,12 km<sup>2</sup> atau sekitar seperempat luas wilayah Pulau Jawa (BPS Jawa Tengah, 2018). Wilayah terluas adalah Kabupaten Cilacap, yaitu sebesar 2.138,51 km<sup>2</sup>, sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Magelang, yaitu seluas 18,12 km<sup>2</sup>. Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018, jumlah

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tidak mengalami pemekaran. Dari hasil Podes 2018 terlihat bahwa Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 6 Kota dan 29 Kabupaten, dengan jumlah kecamatan sebanyak 573 kecamatan. Selain itu, hasil Podes 2018 juga memperlihatkan bahwa jumlah wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa tercatat sebanyak 7.809 desa dan 750 kelurahan. Dari total 7.809 desa tersebut, sebanyak 6.632 desa (84,93 persen) terkategori sebagai desa berkembang dan sebanyak 1.133 desa (14,51 persen) terkategori sebagai desa mandiri. Sisanya, sebanyak 44 desa (0,56 persen) masih terkategori sebagai desa tertinggal (BPS, 2018). Kategorisasi ini didasarkan pada Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dihitung oleh BPS. IPD menunjukkan tingkat perkembangan desa yang disusun berdasarkan 5 dimensi, yaitu; Pelayanan Dasar, Kondisi Infrastruktur, Transportasi, Pelayanan Umum, dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Seperti halnya wilayah lainnya yang berada pada jalur cincin api dunia (*ring of fire*), Jawa Tengah memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif. Dari sebelas gunung besar yang ada di Jawa Tengah, enam diantaranya merupakan gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Slamet, Sumbing, Sindoro, Merbabu, Merapi, dan Gunung Ungaran. Keberadaan gunung aktif ini menjadikan daerah di sekitar lereng gunung menjadi wilayah yang cukup subur untuk budidaya tanaman pertanian dan perkebunan. Di lereng gunung Sumbing-Sindoro-Slamet misalnya, terbentang lahan pertanian tanaman hortikultura dan perkebunan. Pun demikian di lereng gunung Merapi, yang juga menghasilkan mineral alam berupa batu pasir yang sangat berkualitas. Bahkan, wilayah lereng gunung Merapi menjadi salah satu pemasok batu pasir yang utama di Jawa Tengah.

### 3.1.2. Demografi Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Jawa Tengah tercatat sebanyak 32.443.899 orang. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 36.742.501 orang. Jumlah ini bertambah sekitar 4 juta orang apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010. Kabupaten Brebes memiliki penduduk sebanyak 1,99 juta (5,42%) menjadi kota dengan jumlah penduduk terbanyak, sedangkan Kota Magelang dengan penduduk sebanyak 121,61 ribu (0,33%) menjadi Kota dengan jumlah penduduk paling sedikit di Jawa Tengah.

Selain itu, Provinsi Jawa Tengah juga memiliki jumlah angkatan kerja sebesar 18,96 juta atau 69,58% dari total penduduk usia 15 tahun ke atas (sakernas, Agustus 2021). Sisanya adalah penduduk yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Dari total penduduk angkatan kerja, sebanyak 94,05% mempunyai status bekerja. Sebagian besar penduduk Jawa Tengah bekerja pada sektor pertanian sebesar 23,74% (sakernas, Agustus 2021). Selain pertanian, sektor industri dan perdagangan juga mewarnai sumber ekonomi penduduk Jawa Tengah dengan besaran masing-masing 22,17% dan 19,47%.

### 3.2. Posisi Ekonomi Jawa Tengah di Indonesia

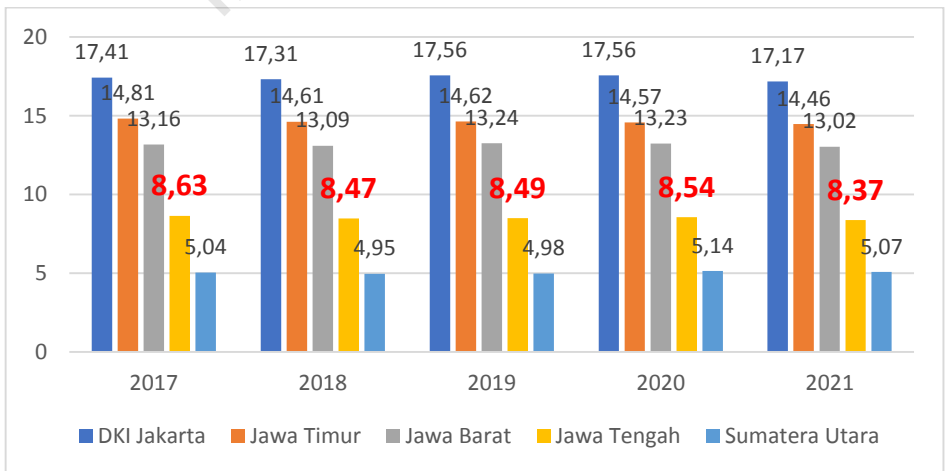
Jawa Tengah merupakan provinsi yang sangat potensial dengan karakteristik ekonomi yang berpotensi menumbuhkan perekonomian nasional. Pertama, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia ini berpotensi menarik investor. Kedua, Jawa Tengah mempunyai kontribusi ekonomi nasional

keempat setelah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Kontribusi ekonomi Jawa Tengah terhadap nasional sebesar 8,37% pada tahun 2021.

Pencapaian pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun terakhir sebelum pandemi telah memberi hasil positif pada level nasional. Sektor-sektor unggulan yang menyumbang pembangunan nasional adalah sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.

Sebagai provinsi penyumbang ekonomi keempat di Indonesia, Jawa Tengah menjadi salah satu prioritas percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah RI bahkan mengeluarkan Perpres No.79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan yang ada di Jawa Tengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 7%. Walaupun pembangunan saat ini terhambat karena adanya pandemi Covid19 pada tahun 2020, namun 2021 kembali tumbuh walaupun belum pulih seperti sebelum pandemi.

Grafik 3.1. Kontribusi Ekonomi Lima Terbesar Provinsi di Indonesia 2017-2021



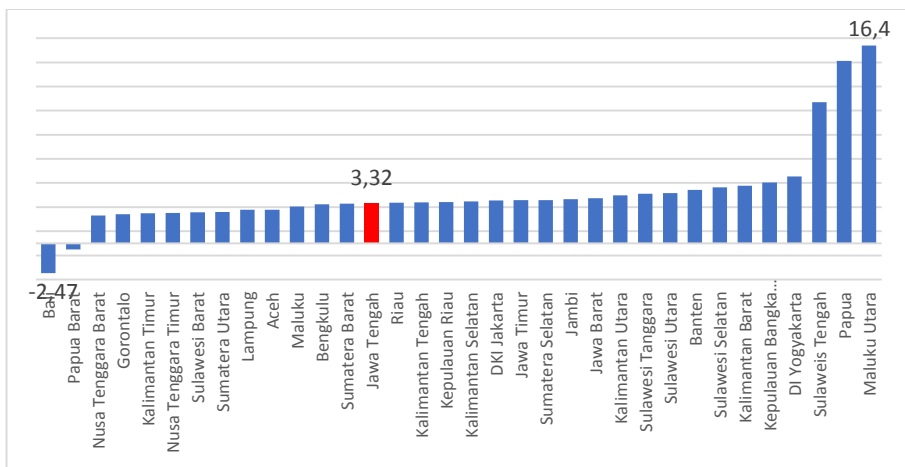
Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, jika pertumbuhan ekonomi tinggi menandakan ada pergerakan pembangunan pada wilayah tersebut.

Perekonomian suatu wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Dalam peningkatan faktor produksi ini yang kemudian disebut pertumbuhan ekonomi. Jawa Tengah dalam periode 2014-2019 mempunyai pertumbuhan ekonomi diatas 4% dan kinerja ekonomi di atas kinerja ekonomi nasional.

Tahun 2020 merupakan tahun pandemi pada hampir semua negara. Penularan kasus covid19 yang berdampak kematian membuat semua orang seakan berhenti beraktivitas diluar seperti biasa. Semua pergerakan dibatasi sehingga berdampak pada hancurnya perekonomian. Indonesia juga mengalami hal sama. Hampir semua provinsi di Indonesia kinerja ekonominya terkontraksi kecuali Provinsi Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua.

Grafik 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia 2020



Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)



Tahun 2021 merupakan masa kebangkitan ekonomi setelah mengalami pandemi selama satu tahun. Pengalaman menghadapi pandemi tahun 2020, membuat kebijakan semakin mengarah ke perbaikan ekonomi dengan melakukan PPKM level wilayah. Tidak menggunakan PSBB seperti tahun 2020. Hal ini membuat perekonomian mulai menggeliat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 3,32%. Kecuali provinsi Bali dan Papua Barat yang masih berkontraksi -2,47% dan -0,51%. Provinsi Bali yang ekonominya ditopang oleh pariwisata masih merasakan dampak pandemi, karena luar negeri masih memberlakukan pelarangan bepergian ke luar wilayah. Sedangkan Provinsi Papua Barat, penopang perekonomian industri pengolahan mengalami kontraksi.

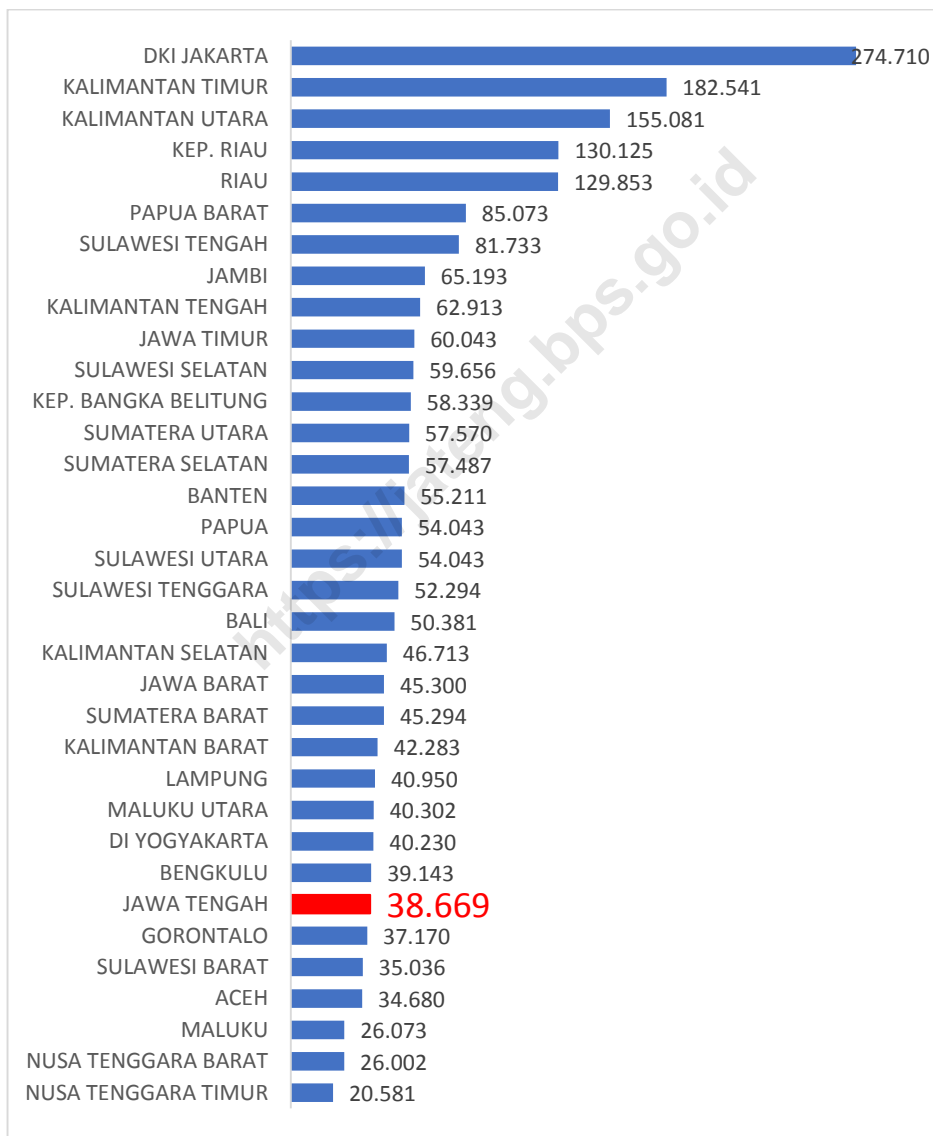
Jawa Tengah juga mengalami kontraksi hingga -2,65% dan lebih rendah dari nasional yang berkontraksi sebesar -2,07%. Kasus covid19 yang terjadi di Jawa Tengah cukup tinggi dibandingkan provinsi lain. Sehingga berbagai kebijakan pembatasan aktivitas ketat dilakukan oleh pemerintah. Dari PSBB hingga PPKM mikro untuk menekan penyebaran virus Covid19 lebih banyak lagi Hal ini tentu berdampak pada kinerja ekonomi yang mengalami kemunduran.

Selain pertumbuhan ekonomi sebagai pengukur keberhasilan pembangunan, PDRB per kapita merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat melalui total PDRB suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Semakin tinggi tingkat PDRB per kapita di suatu wilayah maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Jawa Tengah mempunyai pendapatan per kapita sebesar Rp 38,60 juta. Kondisi ini lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai Rp 56,94 juta. Untuk

peringkat antar provinsi, PDRB per kapita Jawa Tengah berada pada posisi 25 dari 34 provinsi di Indonesia.

Grafik 3.3. PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Indonesia 2021



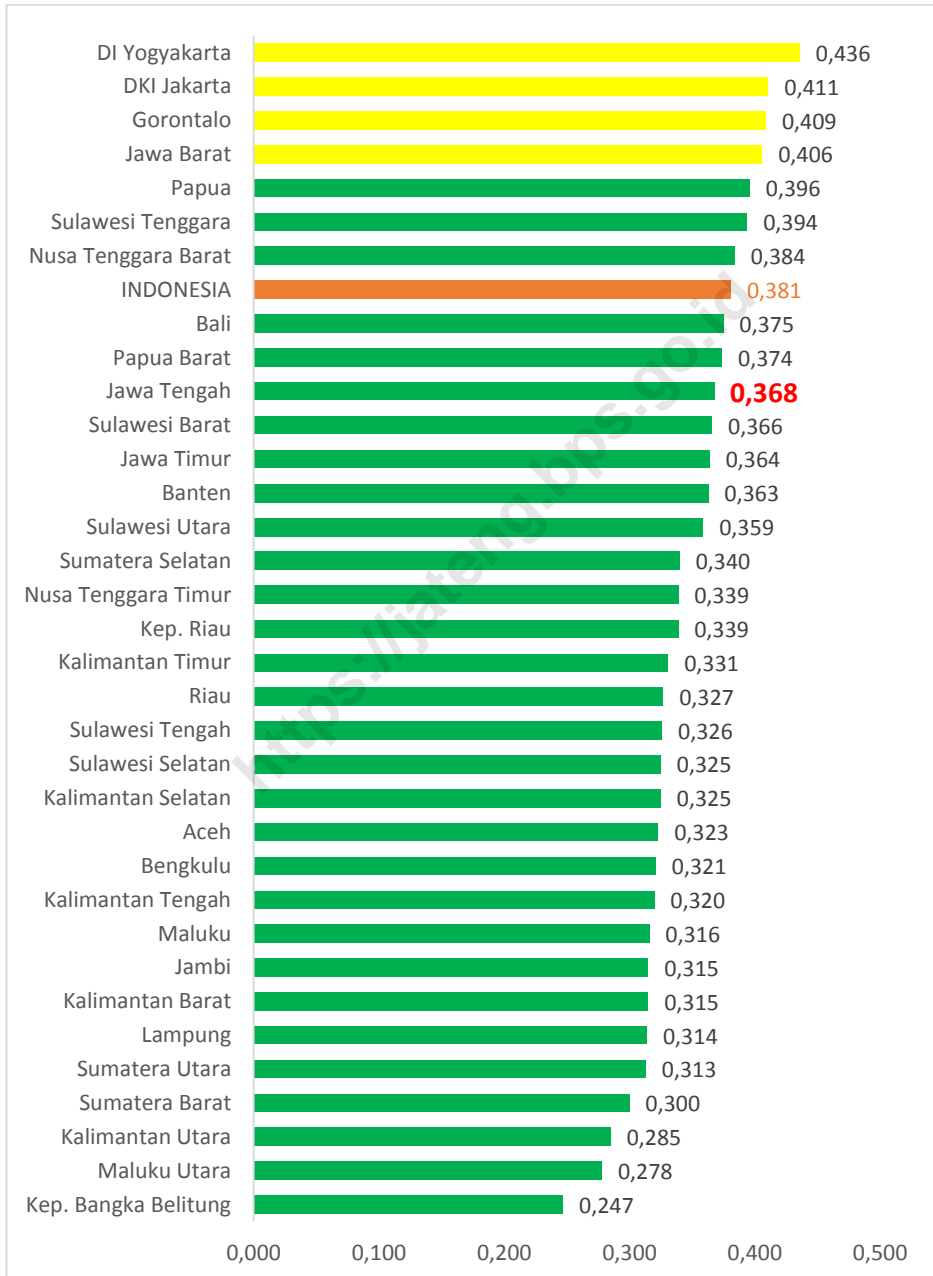
Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Nominal PDRB per kapita ini belum bisa menggambarkan pendapatan masyarakat secara riil. Disparitasnya PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi yang mempunyai PDRB per kapita tertinggi di Indonesia cukup jauh. Provinsi DKI Jakarta memiliki PDRB per kapita tertinggi di Indonesia sebesar 260,44 juta/penduduk. Demikian juga dengan provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau dan Riau yang mempunyai pendapatan per kapita di atas 100 juta/penduduk.

Setelah PDRB per kapita yang masih kurang menggambarkan pendapatan riil, Gini Rasio merupakan alat untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat. Provinsi DI Yogyakarta mempunyai indeks gini rasio tertinggi se-Indonesia sebesar 0,436. Terdapat empat provinsi dengan tingkat gini rasio sedang selain DI Yogyakarta, yaitu provinsi DKI Jakarta, Gorontalo dan Jawa. Sedangkan provinsi dengan Gini Rasio terendah berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Gini Rasio 0,247.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, posisi Gini Rasio Jawa Tengah berada pada peringkat 25 dari 34 provinsi. Ketimpangan pendapatan masyarakat di Jawa Tengah masih pada kategori rendah. Posisi Indeks Gini Rasio Jawa Tengah masih lebih rendah daripada Indonesia. Ini menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Jawa Tengah masih lebih baik daripada Indonesia. Gini Rasio Jawa Tengah sebesar 0,372 pada tahun 2020 masih dalam kategori tingkat ketimpangan rendah.

Grafik 3.4. Gini Rasio Menurut Provinsi di Indonesia 2021



Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

## BAB IV. ANALISIS KETIMPANGAN JAWA TENGAH

Ketimpangan adalah tema yang menarik perhatian dan menjadi isu terkini. Ketimpangan sebagai penanda adanya permasalahan, dan kesetaraan merupakan kondisi terbaik yang dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan sebuah wilayah.

Kategori ketimpangan ada dua yaitu : *pertama*, ketimpangan hasil (ketimpangan pendapatan). Kedua, ketimpangan ketidaksetaraan kesempatan (ketimpangan wilayah karena proses dari pembangunan sumber daya alam dan infrastruktur).

Ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan, Gini Rasio dan Kriteria Bank Dunia. Sedangkan ketimpangan kesempatan dapat diukur dengan Pendapatan per kapita dan Indeks Williamson yang mencerminkan kondisi kesenjangan wilayah.

### 4.1. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah antara pendapatan masyarakat yang satu dengan yang lainnya terjadi *gap*. Jika *gap* ini semakin tinggi yang terjadi adalah tidak kondusifnya suatu wilayah karena ada jurang yang sangat dalam memisahkan si miskin dan si kaya.

Studi yang dilakukan oleh *International Monetary Fund* (IMF) menunjukkan bahwa tingginya tingkat ketimpangan mempunyai implikasi terhadap pertumbuhan stabilitas makroekonomi (IMF, 2015). Selain itu, IMF juga menunjukkan bahwa tingginya tingkat ketimpangan dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik dan memicu terjadinya konflik. Kondisi tersebut

menyebabkan terganggunya pertumbuhan ekonomi dan juga berdampak negatif terhadap investasi pembangunan. Lebih lanjut, dengan adanya ketimpangan maka pemerintah dalam menghadapi goncangan ekonomi juga menjadi semakin sulit karena masyarakat yang relatif heterogen.

#### **4.1.1. Perkembangan Gini Rasio Jawa Tengah**

Selama periode 2017 – 2021, angka gini rasio untuk Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Posisi gini rasio Jawa Tengah berada pada kategori ketimpangan rendah. Walaupun dalam perjalanannya menunjukkan pola yang berfluktuasi meskipun dengan kecenderungan yang menurun..

Pada tahun 2017, angka gini rasio Jawa Tengah tercatat sebesar 0,365. Sementara itu pada saat yang sama angka gini rasio Indonesia sebesar 0,398. Selanjutnya pada tahun 2018, angka gini rasio Jawa Tengah dan Indonesia mengalami peningkatan masing-masing menjadi sebesar 0,378 dan 0,401. Bahkan Indonesia masuk dalam gini rasio level sedang. Namun pada tahun 2019, angka gini rasio Jawa Tengah turun menjadi 0,361 sementara angka gini rasio Indonesia ikut turun menjadi 0,390. Setahun kemudian, angka gini rasio Jawa Tengah dan Indonesia kembali meningkat dengan masing-masing 0,362 dan 0,399. Kondisi ini terjadi karena Covid19. Tahun 2021, gini rasio Jawa Tengah terus meningkat menjadi 0,362 sedangkan posisi gini rasio Indonesia konsisten menurun menjadi 0,381.

Angka gini rasio Jawa Tengah yang fluktuatif menunjukkan masih tingginya tingkat ketimpangan di wilayah tersebut. Dalam hal ini, terdapat ketimpangan tingkat pengeluaran antara kelompok masyarakat atas dengan kelompok masyarakat bawah. Selain itu, kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa

hasil pembangunan masih belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat di Jawa Tengah.

Grafik 4.1. Perkembangan Gini Rasio Jawa Tengah dan Indonesia, Maret 2017 – Maret 2021

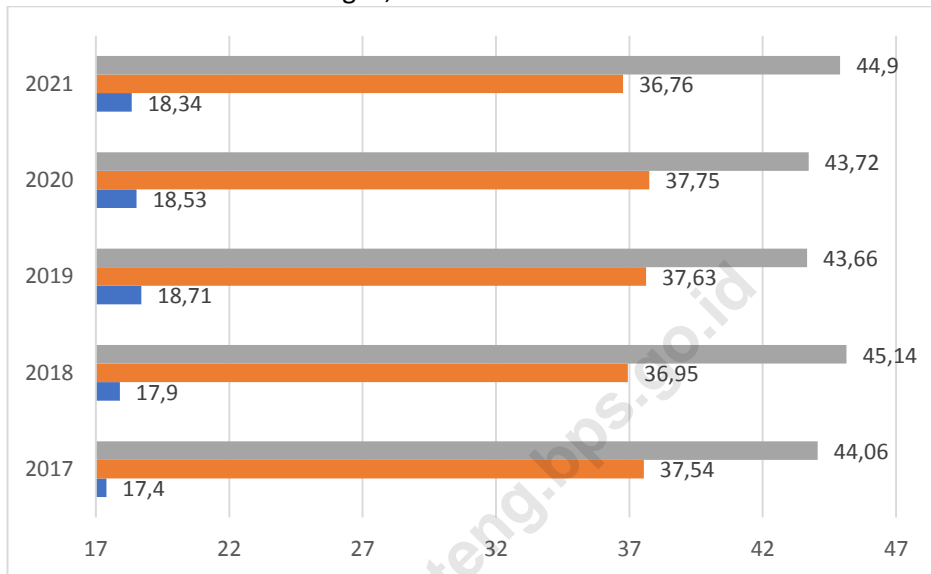


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

#### 4.1.2. Kriteria Bank Dunia

Untuk mengukur ketimpangan penduduk, Bank Dunia menggunakan indikator yang didasarkan pada distribusi pendapatan penduduk menurut kelompok pendapatan. Menurut ukuran tersebut, tingkat ketimpangan termasuk tinggi jika 40% kelompok terendah mempunyai total pendapatan kurang dari 12% dari seluruh pendapatan. Jika proporsi pendapatan dari 40% kelompok terendah sebanyak 12%-17%, maka termasuk ketimpangan pendapatan sedang/menengah. Adapun ketimpangan dianggap rendah jika 40% kelompok terendah mempunyai total pendapatan lebih dari 17% dari total pendapatan.

Grafik 4.2. Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Golongan 40% Bawah di Jawa Tengah, 2017-2021



Sumber : [www.bpsjateng.go.id](http://www.bpsjateng.go.id)

Tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah jika diukur dengan menggunakan kriteria Bank Dunia termasuk ke dalam kategori ketimpangan rendah yaitu sebesar 18,34%. Kue pembangunan tersebut dinikmati masyarakat 40% golongan berpendapatan rendah. Walaupun demikian, kondisi kesenjangan ini hanya sedikit berada di atas ambang batas kategori. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan yang masuk kategori rendah pada tahun 2020 masih perlu diwaspadai karena masih rentan masuk dalam kategori sedang/menengah.

Hal lain yang dapat diamati dari hasil perhitungan kriteria Bank Dunia tersebut adalah kontribusi pengeluaran penduduk pada kelompok 20% penduduk berpenghasilan teratas melebihi dua kali lipat dari 40% penduduk dengan penghasilan terendah. Tabel 4.2. menjelaskan dominasi kelompok penduduk 20% pengeluaran teratas masih sangat tinggi selama lima tahun terakhir.



Penerimaan golongan ini dalam 3 tahun terakhir befluktuasi. Dari yang menguasai 45,14% di tahun 2018, kemudian turun menjadi 43,66% pada tahun 2019 dan berturut-turut naik dari 43,72% tahun 2020 dan 44,90% tahun 2021 dari total pengeluaran masyarakat Jawa Tengah.

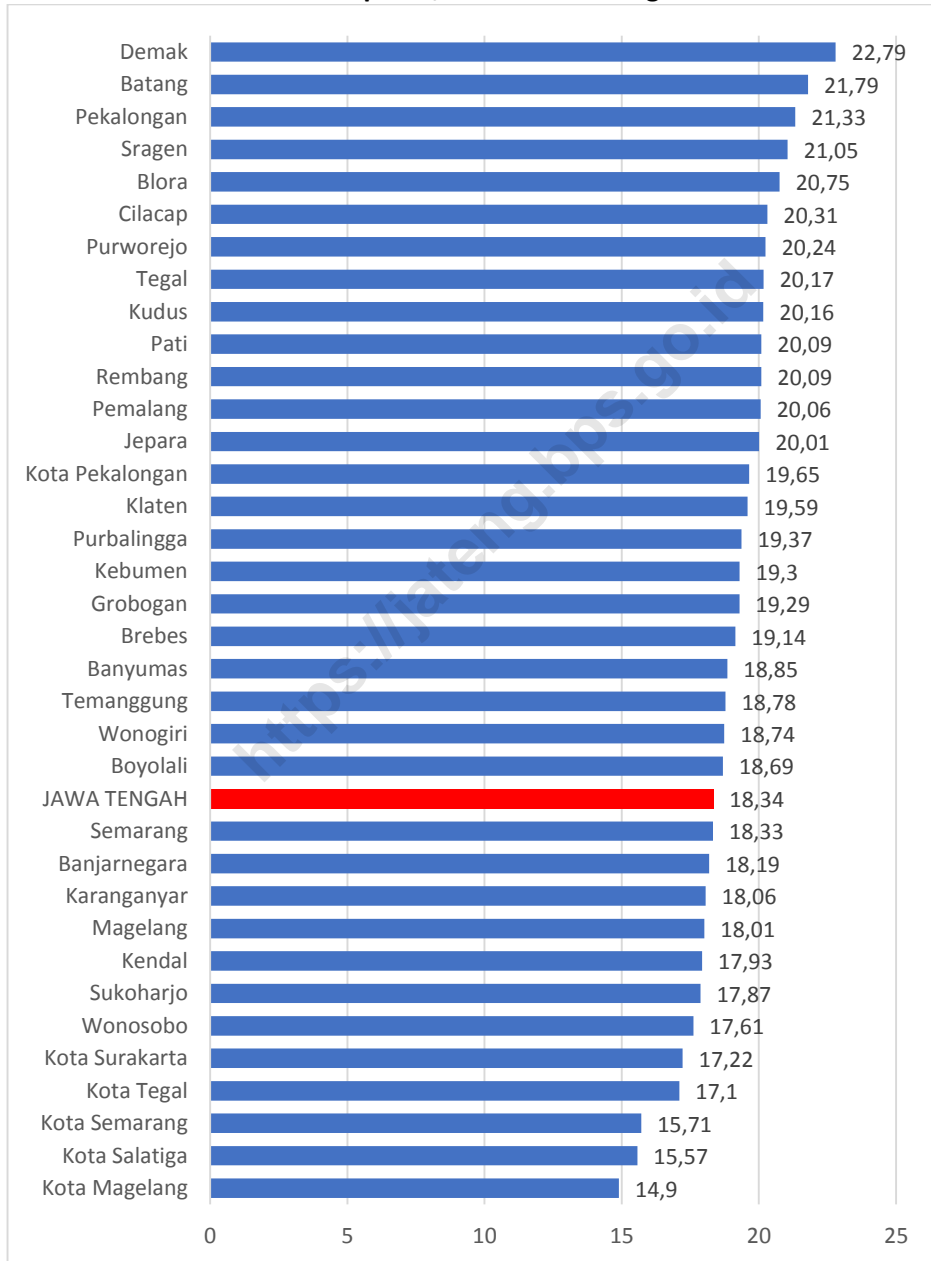
Meskipun berfluktuasi namun terlihat adanya kecenderungan semakin meningkat persentase pengeluaran dari kelompok penduduk 40% terbawah. Dengan semakin meningkatnya persentase pengeluaran kelompok penduduk ini, hal tersebut mengindikasikan semakin membaiknya tingkat ketimpangan di Jawa Tengah.

Jika diamati dari grafik 4.3. terdapat 5 kota di Jawa Tengah berada di posisi ketimpangan sedang. Karena *gap* lapisan penduduk di perkotaan lebih beragam dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Ekonomi di kabupaten cenderung dengan ekonomi kerakyarakat sehingga hasil pembangunan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Ada 1 kota di Jawa Tengah yang ketimpangannya rendah. Kota tersebut adalah Kota Pekalongan. Kota Pekalongan yang letaknya berada di pantura jika diamati sebagian besar ekonominya ditopang oleh industri pengolahan yang didominasi oleh usaha rumah tangga.

Kabupaten Demak mempunyai ketimpangan yang terendah di Provinsi Jawa Tengah dengan 40% penduduk golongan pengeluaran terendah menikmati 22,86% dari total pengeluaran.

**Grafik 4.3. Ketimpangan Pendapatan Golongan 40% Bawah Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2021**



Sumber : [www.bpsjateng.go.id](http://www.bpsjateng.go.id)

Sedangkan ketimpangan sedang ada di Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Magelang dengan nilai masing-masing 15,71%, 15,57% dan 14,9%. Sedangkan semua kabupaten/kota di Jawa Tengah masuk dalam kriteria ketimpangan rendah.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah fluktuasi yang terjadi baik pada angka gini rasio maupun ukuran Bank Dunia. Masih berfluktuasinya angka gini rasio dan persentase pengeluaran penduduk menurut kelompok pengeluaran menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan mempunyai potensi yang besar untuk meningkat. Diperlukan program dan kebijakan yang lebih strategis agar ketimpangan dapat diturunkan secara lebih konsisten.

## **4.2. Ketimpangan Wilayah**

Salah satu permasalahan yang masih belum dapat diselesaikan di Indonesia adalah permasalahan mengenai ketimpangan wilayah atau kesenjangan pembangunan antar wilayah. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang cepat namun di beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Salah satu provinsi yang tidak terlepas dari masalah ketimpangan wilayah adalah Provinsi Jawa Tengah.

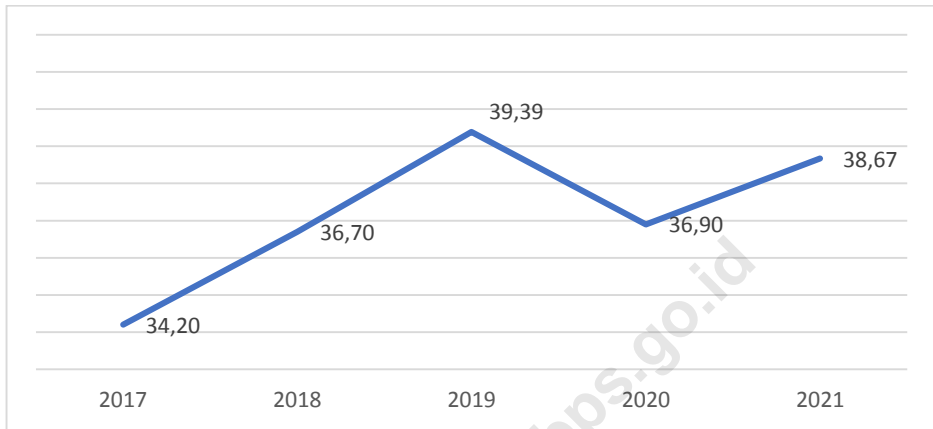
Ketimpangan wilayah ini dapat diukur dengan pendapatan per kapita dan Indeks Williamson.

### **4.2.1. Perkembangan PDRB Per Kapita Jawa Tengah**

PDRB per kapita Jawa Tengah telah naik tajam selama satu dekade terakhir. Walaupun pada tahun 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan yang disebabkan pandemi covid19.

**Grafik 4.4. Perkembangan PDRB Per Kapita Jawa Tengah (Juta Rupiah),**

**2017-2021**



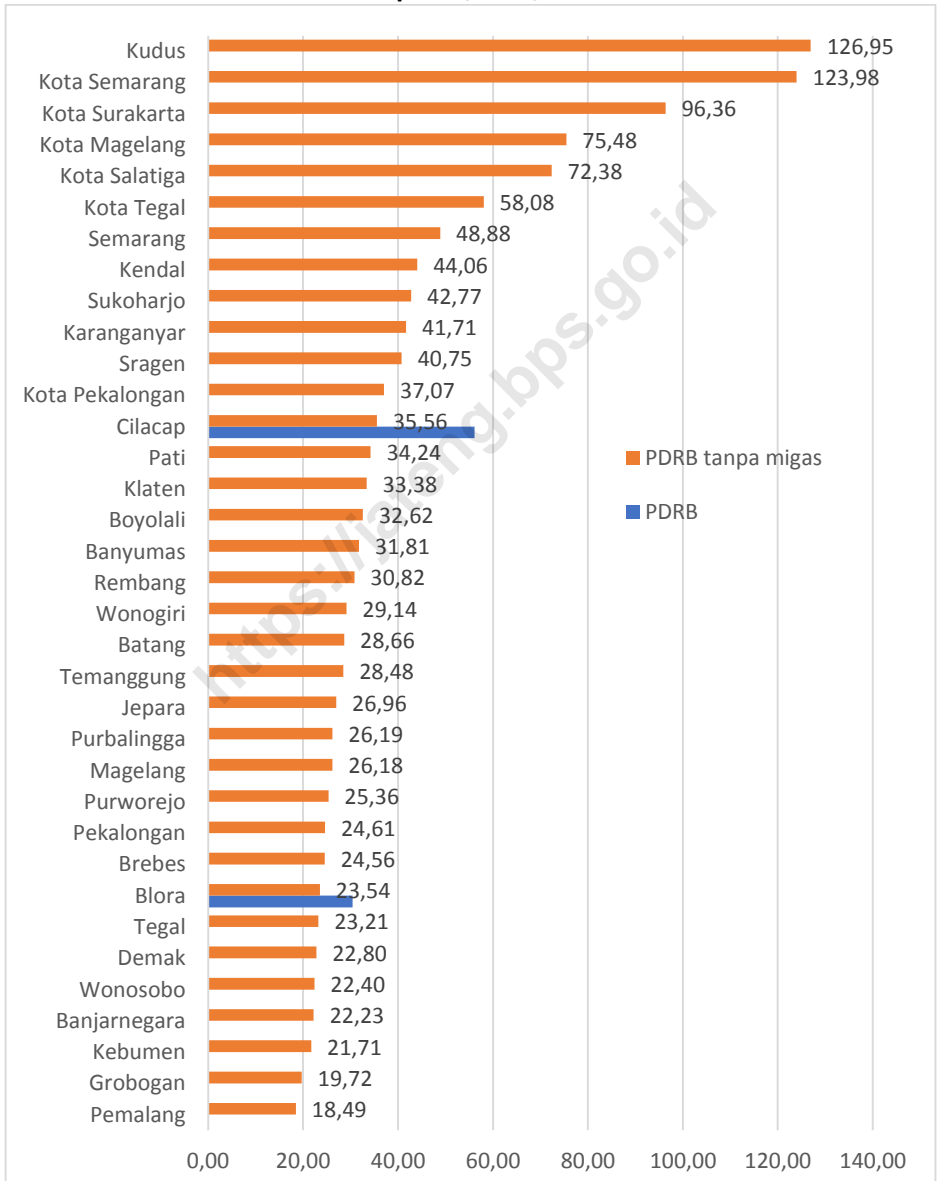
Sumber : [www.bpsjateng.go.id](http://www.bpsjateng.go.id)

Pada gambar 4.4. dengan menggunakan PDRB per kapita harga berlaku Provinsi Jawa Tengah, dimana pada tahun 2010-2019 angka PDRB per kapita mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2017 PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 34,2 juta merupakan angka PDRB per kapita terendah selama kurun waktu 6 tahun, dan pada tahun 2019 PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 39,4 juta merupakan angka PDRB per kapita tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa angka PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020 PDRB per kapita turun menjadi Rp 38,6 juta karena terjadi pandemi. Namun tahun 2021, PDRB per kapita Jawa Tengah kembali meningkat sebesar Rp 38,7 juta.

Namun demikian peningkatan PDRB per kapita ini tidak bisa langsung dianalisis sebagai peningkatan kesejahteraan. Perlu dilihat pendapatan per kapita antar kabupaten/kota di Jawa Tengah.

#### 4.2.2. Analisis PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota

**Grafik 4.5. PDRB Per Kapita Jawa Tengah (juta Rupiah) Menurut Kabupaten/Kota, 2021**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Untuk melihat ketimpangan antar wilayah pada grafik 4.5 adalah gambaran pendapatan per kapita antar wilayah di Jawa Tengah.

Data menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah diatas Rp 100 juta per kapita adalah kabupaten Kudus sebesar Rp 126,95 juta dan Kota Semarang sebesar Rp 123,98 juta. Kabupaten Kudus menonjol pada industri pengolahan dengan kontribusi industrinya mencapai 80,97% terhadap total PDRB Kabupaten Kudus. Sedangkan sumbangan industri pengolahan Kabupaten Kudus terhadap total industri pengolahan di Jawa Tengah tertinggi dengan kontribusi sebesar 18,99%.

Kalau dilihat dari letak geografisnya daerah-daerah yang mengelilingi Kabupaten Kudus mempunyai PDRB per kapita yang rendah walaupun sumber daya alam di daerah-daerah tersebut tidak banyak berbeda. Seperti halnya Kabupaten Kudus yang secara geografis dikelilingi oleh kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan. Dari keempat kabupaten, hanya Kabupaten Pati yang memiliki PDRB per kapita cukup tinggi. Sedangkan tiga kabupaten lainnya mempunyai PDRB per kapita yang rendah dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk Kota Semarang merupakan ibukota dan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sehingga perekonomiannya sangat maju dan menjadi tempat berkembangnya industri pengolahan, sektor jasa dan juga tempat wisata. Kalau dilihat dari letak geografisnya beberapa kota yang menjadi satelit seperti kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal PDRB per kapita cukup tinggi

walaupun masih kalah dibandingkan dengan Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Tegal.

Grafik 4.5. menunjukkan bahwa masih ada jarak yang cukup jauh antara PDRB per kapita tertinggi yang diduduki oleh kabupaten Kudus dengan nilai sebesar Rp 126,95 juta. Sedangkan PDRB per kapita Kabupaten Pemalang merupakan PDRB yang terendah, hanya sebesar Rp 18,49 juta. Perbedaan akan sumber daya alam dan juga infrastruktur memang sangat mempengaruhi pendapatan setiap daerah di Jawa Tengah. Dilihat dari ketimpangan PDRB per kapita dari yang tertinggi hingga terendah sangat jauh perbedaannya mencapai 108,46 juta dan ini masih jauh dari rata-rata PDRB per kapita provinsi yang sebesar 38,67 juta rupiah.

Dengan ketimpangan PDRB per kapita cukup jauh maka perlu diteliti lebih lanjut bagaimana tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat. Jika proporsi pengeluaran 40% masyarakat golongan bawah kecil maka, ketimpangan pembangunan cukup tinggi.

### **4.3. Analisis Indeks Williamson**

Perbedaan sumber daya alam, keterampilan tenaga kerja, teknologi, dan akumulasi modal lainnya yang dimiliki oleh suatu wilayah telah mengakibatkan perbedaan laju pertumbuhan ekonomi, heterogenitas karakteristik wilayah juga menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah. Analisis tingkat ketimpangan pembangunan menggunakan Indeks Williamson dengan menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar, alasannya karena diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah.

Data yang diperlukan untuk mengukur Indeks Williamson adalah dengan PDRB per kapita untuk setiap kabupaten/kota dan jumlah penduduk tiap kabupaten/kota. Bila indeks mendekati 0 (nol) artinya sangat merata, sedangkan semakin jauh dari 0 (nol) artinya sangat timpang.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah kebijakan pembangunan di provinsi Jawa tengah selama 2017-2021 dianalisis menggunakan Indeks Williamson dan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan semakin melebar atau semakin merata dapat dilihat pada grafik 4.6. Pengukuran Indeks Williamson ini membedakan PDRB total dengan migas dan PDRB tanpa migas.

Upaya pemerintah dalam menurunkan ketimpangan telah berhasil pada tahun 2017-2019 yang mencapai 0,619 dari sebelumnya 0,622 pada tahun 2017. Namun, ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong ketidakmerataan pembangunan tinggi karena angka indeksnya diatas 0,5.

Tabel 4.1. Indeks Williamson di Provinsi Jawa Tengah 2017-2021

Tahun	Indeks Williamson
2017	0,622
2018	0,619
2019	0,619
2020	0,657
2021	0,656
Rata-rata	0,634

Sumber : BPS data diolah

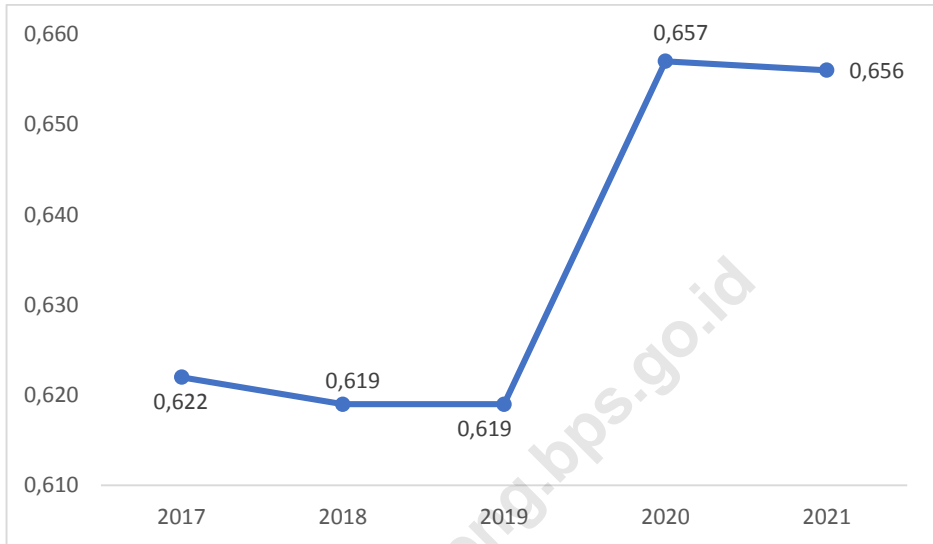


Rata-rata indeks williamson PDRB non migas selama tahun 2017-2020 berkisar pada nilai 0,634. Indeks ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,657 dan yang terendah pada tahun 2017 sebesar 0,622. Indeks williamson PDRB non migas juga masih tergolong ketidakmerataan tinggi.

Ketimpangan ini terjadi karena masing-masing kabupaten/kota memiliki sumber daya alam dan infrastruktur yang berbeda-beda dimana hal tersebut menghasilkan pendapatan yang besar bagi daerah yang memilikinya. Seperti Kabupaten Kudus yang memiliki sejumlah perusahaan besar nasional yang beroperasi di daerah tersebut. Kota Semarang memiliki berbagai fasilitas seperti pelabuhan antar pulau dan bandara internasional, sehingga menjadi pusat perdagangan di Jawa Tengah.

Disisi lain Kabupaten Grobogan mempunyai PDRB per kapita terendah. Sektor yang berkontribusi menopang perekonomiannya adalah pertanian. Ini merupakan usaha keras pemerintah untuk menciptakan iklim kondusif bagi penanam modal di dalam maupun modal asing untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dan lebih menggali lagi potensi pertanian yang bisa menjadi produk unggulan dari Kabupaten Grobogan sehingga bisa menambah nilai tambah bruto wilayah tersebut. Dengan bertambahnya nilai tambah bruto tersebut akan menekan ketimpangan di Jawa Tengah.

**Grafik 4.6. Indeks Williamson PDRB di Provinsi Jawa Tengah 2017-2021**



Sumber : BPS data diolah

Faktor perencanaan dan manajemen pembangunan yang baik akan menyebabkan kawasan menjadi kawasan ekonomi yang strategis. Merujuk pada peta wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan kondisi sumber daya alam yang dimiliki menyebabkan ketimpangan-ketimpangan di sektor-sektor tertentu. Ketimpangan tersebut mengakibatkan arus urbanisasi meningkat, ketidakmerataan pembangunan, kemiskinan, pengangguran, ketidakseimbangan SDM, ketidakmerataan penggunaan teknologi, dan aksesibilitas yang kurang memadai.

Jika diamati dari grafik 4.6. disparitas indeks williamson dan indeks williamson non migas semakin mengecil dari 2017-2020. Ini menandakan penciptaan ekonomi riil Jawa Tengah semakin meningkat. Ini suatu pertanda yang baik, karena kinerja ekonomi riil lebih dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Permasalahan yang masih menjadi PR pemerintah adalah menekan ketimpangan pembangunan. Sehingga pembangunan riil ini lebih bisa dinikmati oleh semua wilayah di Jawa Tengah.

Namun tahun 2021, Indeks Williamson sedikit mengalami penurunan dengan besaran 0,656 atau turun 0,001 poin. Jawa Tengah belum sepenuhnya pulih dari keadaan pandemi tahun 2020. Varian baru Covid19 masih muncul tahun 2021, walaupun perekonomian sudah mulai bangkit.

<https://jateng.bps.go.id>



## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang sudah diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketimpangan jadi penanda adanya bermasalah dan kesetaraan merupakan kondisi terbaik yang dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan sebuah wilayah.
2. Kategori ketimpangan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
  - Ketimpangan hasil : ketimpangan pendapatan/pengeluaran
  - Ketidaksetaraan kesempatan : ketimpangan wilayah karena infrastruktur dan sumber daya alam
3. Provinsi Jawa Tengah mempunyai kontribusi ekonomi keempat setelah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat.
4. Kontribusi Jawa Tengah terhadap ekonomi nasional tahun 2021 sebesar 8,37%.
5. PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat 28 nasional dan dibawah rata-rata PDRB per kapita Indonesia
6. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah 2014-2019 berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan tahun 2020, kinerja ekonomi Provinsi Jawa Tengah berkontraksi -3,27%. Tahun 2021 kembali

bangkit dengan tumbuh sebesar 3,32%. Pertumbuhan ekonomi ini berada di bawah nasional.

7. Gini Rasio Jawa Tengah sebesar 0,372 tahun 2021 masih dalam kategori tingkat ketimpangan rendah. Ini menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Jawa Tengah masih merata.
8. Tahun 2019 PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 34,2 juta merupakan angka PDRB per kapita terendah sepanjang tahun 2017-2019 dan terus meningkat meningkat hingga Rp 39,39 juta. Hal ini menunjukkan bahwa angka PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020 PDRB per kapita turun menjadi Rp 36,6 juta karena terjadi pandemi. Kemudian kembali menjadi Rp 38,67 juta.
9. PDRB per kapita kabupaten/kota di Jawa Tengah tertinggi Kabupaten Kudus dengan Rp 126,95 juta dan terendah Kabupaten Grobogan sebesar Rp 18,49 juta.
10. Distribusi pendapatan menurut kriteria Bank Dunia, Kota Magelang, Kota Semarang dan Kota Salatiga masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Sedangkan kabupaten/kota lainnya masuk dalam kategori ketimpangan rendah.
11. Indeks Williamson Jawa Tengah masih tergolong ketidakmerataan tinggi. Namun dalam periode 2017-2019 semakin menurun ketimpangannya. Kembali naik tahun 2020 karena pandemi sebesar 0,657 dan turun lagi 0,001 poin tahun 2021 sebesar 0,656.

## 5.2. Saran

1. Kebijakan pembangunan memprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju dan tumbuh pesat. Bagi kabupaten/kota yang masuk dalam daerah maju adalah memberikan bantuan bagi daerah tertinggal berupa pembiayaan program pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (menciptakan *humancapital*), karena peningkatan kualitas sumber daya manusia ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan melalui peningkatan penyerapan ide dan inovasi teknologi kewirausahaan. Kebanyakan kabupaten/kota yang sudah maju dan berkembang cepat mengandalkan sektor industri dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga *sharing skill* ke daerah tertinggal dengan menularkan keterampilan yang dimiliki.
2. Konsolidasi antar daerah atau kabupaten/kota dengan pemerintahan provinsi dengan membuat perencanaan pembangunan terstruktur untuk meminimalisir ketimpangan.
3. Membangun konektivitas ekonomi antar daerah dengan pembangunan infrastruktur dan sarana informasi yang seimbang. Konektivitas ini akan menyebabkan transfer sumber daya alam dan tenaga kerja akan lebih efisien.
4. Pengembangan sektor potensi pada daerah tertinggal dan memasarkan produk-produknya ke keluar daerah.





## Daftar Pustaka

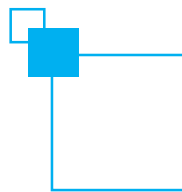
- Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta
- Aswandi, H dan Kuncoro, Mudrajad. 2002. Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 17, I, 2002, 27-45
- BPS Jawa Tengah. 2021. Beberapa Indikator Sosial Ekonomi BPS Provinsi Jawa Tengah Edisi Sepetember 2021. Semarang
- BPS Jawa Tengah. 2021. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha 2016-2020. Semarang
- Boediono. 1992. Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta





# Lampiran

<https://jateng.bps.go.id>





**Tabel 1. PDRB Per Kapita menurut Provinsi di Indonesia, 2017-2021**

Provinsi	2017	2018	2019
DKI JAKARTA	228 002,73	247 678,50	266 794,00
KALIMANTAN TIMUR	165 546,62	174 164,80	175 245,90
KALIMANTAN UTARA	111 318,54	119 413,90	130 067,00
KEP. RIAU	109 332,85	116 461,40	122 237,70
RIAU	105 844,77	110 384,90	109 092,90
PAPUA BARAT	78 423,63	84 958,03	87 899,52
SULAWESI TENGAH	45 157,28	55 518,66	60 818,17
PAPUA	57 864,13	63 385,68	56 078,23
JAWA TIMUR	51 228,45	55 410,61	59 089,96
<b>INDONESIA</b>	<b>51 891,18</b>	<b>55 992,14</b>	<b>59 060,10</b>
SULAWESI SELATAN	47 822,11	52 642,08	56 977,52
JAMBI	53 993,40	58 224,89	59 885,54
SUMATERA UTARA	48 003,60	51 427,49	54 908,58
KALIMANTAN TENGAH	48 293,22	52 107,23	55 251,79
SUMATERA SELATAN	46 315,05	50 104,67	53 554,10
SULAWESI UTARA	44 744,20	48 105,41	51 927,61
BALI	50 167,07	54 433,46	58 137,73
KEP. BANGKA BELITUNG	48 827,25	50 081,95	50 911,43
BANTEN	45 275,58	48 370,15	51 182,45
SULAWESI TENGGARA	41 278,78	44 492,09	47 777,79
SUMATERA BARAT	40 194,29	42 802,66	45 207,45
JAWA BARAT	37 223,11	40 272,64	43 069,45
KALIMANTAN BARAT	35 984,53	38 814,73	41 851,45
KALIMANTAN SELATAN	38 619,54	41 046,28	42 543,96
LAMPUNG	36 998,32	39 716,46	42 228,59
JAWA TENGAH	34 234,31	36 770,96	39 217,68
BENGKULU	31 359,48	33 822,13	36 202,48
DI YOGYAKARTA	31 664,92	34 136,93	36 708,48
GORONTALO	29 565,12	31 827,62	34 211,29
MALUKU UTARA	26 686,06	29 586,12	31 609,31
SULAWESI BARAT	29 675,86	32 059,09	33 586,80
ACEH	28 096,71	29 521,25	30 562,54
NUSA TENGGARA BARAT	24 986,54	24 705,97	26 116,83
MALUKU	22 859,29	24 268,62	25 599,14
NUSA TENGGARA TIMUR	17 165,45	18 417,54	19 560,87

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

**Tabel 1. Lanjutan**

Provinsi	2020	2021
DKI JAKARTA	262 702,12	274 709,59
KALIMANTAN TIMUR	160 109,80	182 540,82
KALIMANTAN UTARA	130 831,10	155 080,62
KEP. RIAU	123 529,17	130 125,23
RIAU	102 291,70	129 852,59
PAPUA BARAT	85 113,41	73 539,00
SULAWESI TENGAH	63 752,76	81 733,04
PAPUA	57 905,09	54 034,26
JAWA TIMUR	57 650,51	60 043,33
<b>INDONESIA</b>	<b>56 938,72</b>	<b>62 236,44</b>
SULAWESI SELATAN	56 505,19	59 656,24
JAMBI	56 240,42	65 193,22
SUMATERA UTARA	55 176,05	57 569,79
KALIMANTAN TENGAH	54 959,31	62 912,85
SUMATERA SELATAN	53 505,42	57 487,44
SULAWESI UTARA	52 317,20	54 043,18
BALI	51 180,81	50 381,21
KEP. BANGKA BELITUNG	52 006,51	58 338,82
BANTEN	47 599,84	55 210,65
SULAWESI TENGGARA	47 243,65	52 293,97
SUMATERA BARAT	44 031,59	45 293,75
JAWA BARAT	41 814,42	45 299,58
KALIMANTAN BARAT	41 677,07	42 282,90
KALIMANTAN SELATAN	41 624,53	46 712,68
LAMPUNG	39 346,53	40 950,42
JAWA TENGAH	38 597,52	38 669,11
BENGKULU	36 307,97	39 143,43
DI YOGYAKARTA	35 646,18	40 229,83
GORONTALO	34 213,45	37 170,45
MALUKU UTARA	32 955,45	40 302,32
SULAWESI BARAT	32 675,04	35 036,02
ACEH	30 472,64	34 680,46
NUSA TENGGARA BARAT	26 049,87	26 002,48
MALUKU	25 254,82	26 072,98
NUSA TENGGARA TIMUR	19 220,10	20 581,13

Sumber : www.bps.go.id

**Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi menurut Provinsi di Indonesia, 2017-2021**

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	4,18	4,61	4,14	-0,37	2,79
Sumatera Utara	5,12	5,18	5,22	-1,07	2,61
Sumatera Barat	5,3	5,14	5,01	-1,6	3,29
Riau	2,66	2,35	2,81	-1,12	3,36
Jambi	4,6	4,69	4,37	-0,46	3,66
Sumatera Selatan	5,51	6,01	5,69	-0,11	3,58
Bengkulu	4,98	4,97	4,94	-0,02	3,24
Lampung	5,16	5,23	5,26	-1,67	2,79
Kep. Bangka Belitung	4,47	4,45	3,32	-2,3	5,05
Kep. Riau	1,98	4,47	4,84	-3,8	3,43
DKI Jakarta	6,2	6,11	5,82	-2,36	3,56
Jawa Barat	5,33	5,65	5,07	-2,44	3,74
Jawa Tengah	5,26	5,3	5,4	-2,65	3,32
Di Yogyakarta	5,26	6,2	6,59	-2,69	5,53
Jawa Timur	5,46	5,47	5,52	-2,39	3,57
Banten	5,75	5,77	5,29	-3,38	4,44
Bali	5,56	6,31	5,6	-9,31	-2,47
Nusa Tenggara Barat	0,09	-4,5	3,9	-0,64	2,3
Nusa Tenggara Timur	5,11	5,11	5,24	-0,83	2,51
Kalimantan Barat	5,17	5,07	5,09	-1,82	4,78
Kalimantan Tengah	6,73	5,61	6,12	-1,4	3,4
Kalimantan Selatan	5,28	5,08	4,08	-1,81	3,48
Kalimantan Timur	3,13	2,64	4,74	-2,85	2,48
Kalimantan Utara	6,8	5,36	6,9	-1,11	3,98
Sulawesi Utara	6,31	6	5,65	-0,99	4,16
Sulawesi Tengah	7,1	20,6	8,83	4,86	11,7
Sulawesi Selatan	7,21	7,04	6,91	-0,7	4,65
Sulawesi Tenggara	6,76	6,4	6,5	-0,65	4,1
Gorontalo	6,73	6,49	6,4	-0,02	2,41
Sulawesi Barat	6,39	6,26	5,67	-2,42	2,56
Maluku	5,82	5,91	5,41	-0,92	3,04
Maluku Utara	7,67	7,86	6,1	4,92	16,4
Papua Barat	4,02	6,25	2,66	-0,77	-0,51
Papua	4,64	7,32	-15,75	2,32	15,11
<b>Indonesia</b>	<b>4,18</b>	<b>4,61</b>	<b>4,14</b>	<b>-0,37</b>	<b>3,69</b>

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

**Tabel 3. Gini Rasio menurut Provinsi di Indonesia,2017-2021 (Maret)**

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	0,329	0,325	0,320	0,323	0,324
Sumatera Utara	0,315	0,318	0,320	0,316	0,314
Sumatera Barat	0,318	0,321	0,310	0,305	0,306
Riau	0,325	0,327	0,330	0,329	0,326
Jambi	0,335	0,334	0,320	0,320	0,321
Sumatera Selatan	0,361	0,358	0,330	0,339	0,341
Bengkulu	0,351	0,362	0,340	0,334	0,326
Lampung	0,334	0,346	0,330	0,327	0,323
Kep. Bangka Belitung	0,282	0,281	0,270	0,262	0,256
Kep. Riau	0,334	0,330	0,340	0,339	0,343
DKI Jakarta	0,413	0,394	0,390	0,399	0,409
Jawa Barat	0,403	0,407	0,400	0,403	0,412
<b>Jawa Tengah</b>	<b>0,365</b>	<b>0,378</b>	<b>0,360</b>	<b>0,362</b>	0,372
DI Yogyakarta	0,432	0,441	0,420	0,434	0,441
Jawa Timur	0,396	0,379	0,370	0,366	0,374
Banten	0,382	0,385	0,370	0,363	0,365
Bali	0,384	0,377	0,370	0,369	0,378
Nusa Tenggara Barat	0,371	0,372	0,380	0,376	0,381
Nusa Tenggara Timur	0,359	0,351	0,360	0,354	0,346
Kalimantan Barat	0,327	0,339	0,330	0,317	0,313
Kalimantan Tengah	0,343	0,342	0,340	0,329	0,323
Kalimantan Selatan	0,347	0,344	0,330	0,332	0,330
Kalimantan Timur	0,330	0,342	0,330	0,328	0,334
Kalimantan Utara	0,308	0,303	0,300	0,292	0,292
Sulawesi Utara	0,396	0,394	0,370	0,370	0,365
Sulawesi Tengah	0,355	0,346	0,330	0,326	0,316
Sulawesi Selatan	0,407	0,397	0,390	0,389	0,382
Sulawesi Tenggara	0,394	0,409	0,400	0,389	0,390
Gorontalo	0,430	0,403	0,410	0,408	0,408
Sulawesi Barat	0,354	0,370	0,370	0,364	0,356
Maluku	0,343	0,343	0,320	0,318	0,314
Maluku Utara	0,317	0,328	0,310	0,308	0,300
Papua Barat	0,390	0,394	0,390	0,382	0,380
Papua	0,397	0,384	0,390	0,392	0,397
<b>Indonesia</b>	<b>0,393</b>	<b>0,389</b>	<b>0,380</b>	<b>0,381</b>	<b>0,384</b>

Sumber : www.bps.go.id



**Tabel 4. Jumlah Penduduk Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota, 2010 dan 2020**

Kabupaten/Kota	2010	2020	2021
Cikacap	1 642 107	1 944 857	1.963.824
Banyumas	1 554 527	1 776 918	1.789.630
Purbalingga	848 952	998 561	1.007.794
Banjarnegara	868 913	1 017 767	1.026.866
Kebumen	1 159 926	1 350 438	1.361.913
Purworejo	695 427	769 880	773.588
Wonosobo	754 883	879 124	886.613
Magelang	1 181 723	1 299 859	1.305.512
Boyolali	930 531	1 062 713	1.070.247
Klaten	1 130 047	1 260 506	1.267.272
Sukoharjo	824 238	907 587	911.603
Wonogiri	928 904	1 043 177	1.049.292
Karanganyar	813 196	931 963	938.808
Sragen	858 266	976 951	983.641
Grobogan	1 308 696	1 453 526	1.460.873
Blora	829 728	884 333	886.147
Rembang	591 359	645 333	647.766
Pati	1 190 993	1 324 188	1.330.983
Kudus	777 437	849 184	852.443
Jepara	1 097 280	1 184 947	1.188.510
Demak	1 055 579	1 203 956	1.212.377
Semarang	930 727	1 053 094	1.059.844
Temanggung	708 546	790 174	794.403
Kendal	900 313	1 018 505	1.025.020
Batang	706 764	801 718	807.005
Pekalongan	838 621	968 821	976.504
Pemalang	1 261 353	1 471 489	1.484.209
Tegal	1 394 839	1 596 996	1.608.611
Brebes	1. 33 869	1 978 759	1.992.685
Kota Magelang	118 227	121 526	121.610
Kota Surakarta	499 337	522 364	522.728
Kota Salatiga	170 332	192 322	193.525
Kota Semarang	1 555 984	1 653 524	1.656.564
Kota Pekalongan	281 434	307 150	308.310
Kota Tegal	239 599	273 825	275.781
<b>Jawa Tengah</b>	<b>32 382 657</b>	<b>36 516 035</b>	<b>36.742.501</b>

Sumber : www.bps.go.id

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

JL. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. (024) 8412804, 8412805, Fax 8311195

Homepage : <https://jateng.bps.go.id> E-mail : [jateng@bps.go.id](mailto:jateng@bps.go.id)